

Nama : **Melda Rakassiw**
NPM : **2213053187**
Kelas : **2B**
Matkul : **Pendidikan Kewarganegaraan**
SKS : **2 SKS**
Dosen Pengampu : **Siti Nuraini, M.Pd.**

Hari/Tgl : **Senin, 13 Maret 2023**

ANALISIS PERKEMBANGAN KONSTITUSI YANG BERLAKU DI INDONESIA MENURUT Prof. JIMLY ASSHIDDIQIE

Hasil Analisis

Menurut Prof. Jimly Ashiddiqie perkembangan konstitusi yang berlaku di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:

1. Aspek Perumusan Konstitusi

Perkembangan konstitusi di Indonesia dimulai dengan Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang menegaskan tekad untuk merdeka dan berdiri sendiri sebagai bangsa Indonesia. Kemudian pada tahun 1945, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi pertama Indonesia. Setelah itu, UUD 1945 mengalami beberapa kali perubahan melalui proses amandemen, baik secara substansial maupun teknis.

2. Aspek Penerapan Konstitusi

Perkembangan penerapan konstitusi di Indonesia juga terus berubah seiring berjalannya waktu. Pada awal kemerdekaan, penerapan konstitusi masih diwarnai oleh ketidakstabilan politik dan kerusuhan. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, penerapan konstitusi semakin membaik, terutama setelah reformasi tahun 1998 yang menghasilkan reformasi kelembagaan, termasuk reformasi di bidang hukum dan tata negara.

3. Aspek Interpretasi Konstitusi

Interpretasi konstitusi juga menjadi bagian penting dalam perkembangan konstitusi di Indonesia. Prof. Jimly menekankan bahwa interpretasi konstitusi haruslah dilakukan secara konsisten dan berdasarkan prinsip-prinsip yang jelas dan konsisten pula. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas hukum dan tata negara.

4. Aspek Pengawasan Konstitusi

Pengawasan konstitusi juga menjadi bagian penting dalam perkembangan konstitusi di Indonesia. Salah satu lembaga yang dibentuk untuk melakukan pengawasan konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi (MK), yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum dan memeriksa dan memutuskan perkara yang berkaitan dengan UUD 1945. Selain itu, masih ada banyak lembaga lainnya yang juga bertugas dalam pengawasan konstitusi, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Yudisial, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

5. Aspek Pembangunan Konstitusi

Pembangunan konstitusi merupakan aspek terakhir dalam perkembangan konstitusi di Indonesia. Pembangunan konstitusi dilakukan untuk meningkatkan kualitas konstitusi itu sendiri, sehingga dapat lebih sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan zaman. Proses pembangunan konstitusi di Indonesia masih terus berlangsung hingga saat ini, melalui proses amandemen UUD 1945, serta upaya-upaya reformasi hukum dan tata negara.